

KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT DI KAWASAN RI-PNG MELALUI PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER DI PORT MORESBY

Reza Kusuma Wardana¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This abstract examines the national interests of the United States in the Republic of Indonesia (RI) and Papua New Guinea (PNG) region through the establishment of a military base in Port Moresby. The analysis explores the strategic motivations of the US, including efforts to counterbalance the regional influence of other powers, secure maritime trade routes, and enhance power projection capabilities in the South Pacific. Furthermore, this abstract investigates the implications of this military base development on regional security dynamics, bilateral relations between the US and RI and PNG, as well as its potential impact on the sovereignty and stability of the region. By considering geopolitical and security perspectives, this research aims to understand how this US initiative reflects and advances its national interests amidst the evolving geostrategic landscape of the Indo-Pacific.

Keywords: United States National Interests, Military Base, Port Moresby, Republic of Indonesia, Papua New Guinea, Geopolitics, Regional Security, Regional Influence, Maritime Trade Routes, Power Projection, Indo-Pacific.

ABSTRAK

Abstrak ini mengkaji kepentingan nasional Amerika Serikat di kawasan Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini (PNG) melalui pembangunan pangkalan militer di Port Moresby. Analisis ini mengeksplorasi motivasi strategis AS, termasuk upaya untuk mengimbangi pengaruh regional kekuatan lain, mengamankan jalur perdagangan maritim, dan meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, abstrak ini meneliti implikasi pembangunan pangkalan militer ini terhadap dinamika keamanan regional, hubungan bilateral antara AS dengan RI dan PNG, serta potensi dampaknya terhadap kedaulatan dan stabilitas kawasan. Dengan mempertimbangkan perspektif geopolitik dan keamanan, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana inisiatif AS ini mencerminkan dan memajukan kepentingan nasionalnya di tengah lanskap geostrategis yang terus berkembang di Indo-Pasifik.

Kata Kunci: Kepentingan Nasional Amerika Serikat, Pangkalan Militer, Port Moresby, Republik Indonesia, Papua Nugini, Geopolitik, Keamanan Regional, Pengaruh Regional, Jalur Perdagangan Maritim, Proyeksi Kekuatan, Indo-Pasifik

PENDAHULUAN

Kepentingan nasional suatu negara mencerminkan tujuan utama yang ingin dicapai demi kelangsungan dan kemakmuran negara tersebut. Dalam aspek politik, kepentingan nasional mencakup stabilitas pemerintahan, kedaulatan negara, dan pengaruh diplomatik di tingkat internasional. Pemerintah harus menjaga sistem politik yang stabil dan demokratis (bila relevan), serta memastikan bahwa negara tidak mudah terpengaruh atau didominasi oleh kekuatan asing yang dapat mengganggu kedaulatan atau ideologi nasional. Di bidang ekonomi, kepentingan nasional berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan, distribusi kekayaan yang adil, serta kemandirian ekonomi.

Negara akan berusaha mengamankan sumber daya alam, memperkuat industri strategis, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Kebijakan ekonomi yang mendukung kepentingan nasional juga melibatkan perlindungan terhadap sektor-sektor vital dari pengaruh asing yang dapat merugikan ekonomi domestik. Dalam sektor pertahanan, kepentingan nasional menuntut kemampuan negara untuk menjaga integritas wilayah dan melindungi warga negaranya dari ancaman eksternal maupun internal. Pembangunan sistem pertahanan yang kuat merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. Hal ini mencakup modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) agar mampu menghadapi ancaman militer konvensional maupun non-konvensional yang semakin kompleks dan berkembang. Modernisasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembaruan teknologi persenjataan, tetapi juga dengan peningkatan kapasitas intelijen, sistem komando, dan kemampuan logistik. Seiring dengan itu, profesionalisme angkatan bersenjata harus terus ditingkatkan melalui pelatihan, pendidikan militer, dan pembentukan doktrin pertahanan yang adaptif terhadap tantangan global. Di samping upaya internal tersebut, diplomasi pertahanan memegang peranan penting dalam memperkuat jaringan kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat. Melalui latihan militer bersama, perjanjian pertahanan, serta dialog keamanan regional dan internasional, negara dapat memperkuat posisi tawarnya, memperluas kerja sama, dan menciptakan lingkungan strategis yang kondusif bagi stabilitas dan perdamaian jangka panjang.

Selanjutnya dengan melihat kawasan Indo-Pasifik telah menjadi arena persaingan geopolitik yang semakin intensif pada abad ke-21. Pergeseran pusat gravitasi ekonomi dan kekuatan militer ke kawasan ini telah menarik perhatian berbagai aktor global, termasuk Amerika Serikat (AS). Dalam konteks ini, keamanan dan stabilitas kawasan menjadi perhatian utama bagi AS, mengingat kepentingan ekonomi, politik, dan strategisnya yang signifikan di Indo-Pasifik (Kaplan, Robert. 2014). Salah satu manifestasi dari keterlibatan AS yang semakin mendalam adalah melalui peningkatan kehadiran militernya, termasuk potensi pembangunan pangkalan militer di lokasi-lokasi strategis.

Papua Nugini (PNG), sebagai negara kepulauan yang terletak di utara Australia dan berbatasan langsung dengan wilayah timur Republik Indonesia (RI), memiliki posisi geografis yang penting dalam arsitektur keamanan regional. Kedekatannya dengan jalur pelayaran utama, sumber daya alam yang potensial, serta posisinya sebagai penghubung antara Asia Tenggara dan Pasifik Selatan menjadikannya area yang menarik bagi kekuatan-kekuatan global yang ingin memproyeksikan pengaruhnya. Dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul indikasi peningkatan keterlibatan AS di PNG, termasuk potensi pembangunan fasilitas militer di Port Moresby.

Kepentingan nasional Amerika Serikat di kawasan RI-PNG bersifat multidimensional.

Secara strategis, kehadiran militer yang lebih kuat di kawasan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengimbangi pengaruh kekuatan regional lain yang sedang tumbuh, terutama Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Ekspansi maritim dan peningkatan kemampuan militer RRT di Laut Cina Selatan dan kawasan Pasifik telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan AS dan sekutunya terkait dengan tatanan internasional berbasis aturan (*rules-based international order*) dan kebebasan navigasi (*freedom of navigation*) (Storey, Ian. 2016). Pembangunan pangkalan militer di Port Moresby dapat memperkuat kemampuan AS untuk melakukan pengawasan maritim, proyeksi kekuatan, dan respons cepat terhadap potensi krisis di kawasan (Mearsheimer, 2001).

Selain pertimbangan strategis, kepentingan ekonomi juga memainkan peran signifikan. Jalur pelayaran melalui Selat Malaka dan perairan di sekitar Indonesia dan Papua Nugini merupakan arteri vital bagi perdagangan global, termasuk bagi kepentingan ekonomi AS. Stabilitas dan keamanan jalur-jalur ini menjadi krusial untuk kelancaran rantai pasok global dan pertumbuhan ekonomi AS. Kehadiran militer AS di kawasan ini dapat dianggap sebagai langkah untuk memastikan keamanan jalur perdagangan dan melindungi kepentingan ekonomi AS dari potensi ancaman.

Lebih lanjut, keterlibatan AS di kawasan ini juga dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan diplomatik. AS memiliki aliansi dan kemitraan strategis dengan sejumlah negara di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Australia dan Jepang (Walt, 1985). Peningkatan kehadiran militer di PNG dapat memperkuat jaringan aliansi ini dan mengirimkan sinyal komitmen AS terhadap keamanan regional. Selain itu, keterlibatan yang lebih aktif di kawasan ini juga dapat meningkatkan pengaruh diplomatik AS dalam forum-forum regional dan internasional.

Namun, potensi pembangunan pangkalan militer AS di Port Moresby juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan potensi implikasi. Bagi Republik Indonesia, sebagai negara tetangga dekat PNG, perkembangan ini perlu dicermati secara seksama. Implikasi terhadap kedaulatan nasional, dinamika keamanan regional, dan potensi dampak terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan AS menjadi isu-isu penting untuk dianalisis. Sementara itu, bagi Papua Nugini sendiri, pembangunan pangkalan militer asing dapat membawa implikasi terhadap kebijakan luar negeri, hubungan dengan negara-negara lain, serta potensi dampak sosial dan ekonomi di dalam negeri.

Oleh karena itu, penelitian mengenai kepentingan nasional Amerika Serikat di kawasan RI-PNG melalui pembangunan pangkalan militer di Port Moresby menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Analisis yang komprehensif diperlukan untuk memahami motivasi, implikasi, dan potensi dampak dari perkembangan ini terhadap dinamika keamanan regional, hubungan antar negara, serta kepentingan nasional masing-masing pihak yang terlibat.

KERANGKA ANALITIK

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan neorealisme sebagai pendekatan utama. Neorealisme, atau realisme struktural, merupakan pengembangan dari realisme klasik yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz. Neorealisme berpendapat bahwa bukan sifat manusia yang menjadi penyebab utama konflik, melainkan struktur sistem internasional itu sendiri. Selain itu, peneliti menggunakan kepentingan nasional yang merupakan konsep kunci dalam Hubungan Internasional. Semua bangsa selalu terlibat dalam proses memenuhi atau

mengamankan tujuan kepentingan nasional mereka. Kebijakan luar negeri setiap negara dirumuskan dengan tujuan utama untuk mengamankan dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Serta konsep *Balance of Power* yang secara historis merupakan salah satu konsep terpenting politik internasional dan disiplin akademik Hubungan Internasional. Secara tradisional teori ini mengasumsikan bahwa negara akan selalu mendahulukan kepentingannya sendiri, termasuk untuk bertahan dan kelangsungan hidup negaranya (Adersen, 2018).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2018), yang menekankan pemahaman Moresby. Proses analisis dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis tematik, di mana data yang dikumpulkan akan dikelompokkan dalam tema-tema tertentu, seperti kepentingan keamanan, dominasi geopolitik, dan kerjasama ekonomi. Analisis ini akan merujuk pada teori-teori hubungan internasional yang relevan, seperti teori realisme dan liberalisme, untuk menjelaskan tindakan Amerika Serikat dalam membangun pangkalan militer di Port Moresby sebagai upaya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Dengan teknik pengumpulan data melalui berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel berita, dan website yang berkaitan dengan topik kebijakan luar negeri Amerika Serikat, hubungan internasional, serta geopolitik kawasan Indo-Pasifik.

PEMBAHASAN

Kompleks Lapangan Udara Port Moresby merupakan kompleks lapangan udara militer Perang Dunia II yang dibangun di dekat Port Moresby di Wilayah Papua dan Nugini. Kompleks ini digunakan selama Pertempuran Nugini sebagai pangkalan operasi udara Sekutu terutama pada tahun 1942 dan awal tahun 1943. Kompleks ini kemudian menjadi pangkalan pendukung saat pertempuran bergerak ke wilayah utara dan barat Nugini. Kompleks ini ditutup dan fasilitas tersebut diserahkan kepada otoritas sipil setelah berakhirnya Perang pada bulan September 1945. Kompleks lapangan udara ini penting secara historis karena dari lapangan udara inilah Angkatan Udara Kerajaan Australia dan Angkatan Udara Angkatan Darat Amerika Serikat mendukung pasukan darat Sekutu dalam Pertempuran Nugini. Lapangan udara ini melambangkan perubahan nasib perang di Pasifik dan berakhirnya ekspansi Jepang di Pasifik Barat Daya selama Perang Dunia II.

Berdasarkan sejarahnya bahwa Bandara Port Moresby sebelum Perang Dunia II menjadi salah satu lapangan udara utama (Lapangan Udara Jackson) yang digunakan oleh pasukan Sekutu selama kampanye Nugini (1942–1945), dan merupakan bagian dari kompleks lapangan udara ganda di wilayah Port Moresby. Ketika pasukan Amerika tiba pada bulan April 1942, lapangan terbang tersebut dikembangkan dan diperluas lebih lanjut. Revetmen dibangun untuk melindungi pesawat yang diparkir dan pertahanan. Dengan berakhirnya perang, USAAF menarik diri dari kompleks tersebut pada tahun 1945; namun, tempat itu digunakan sebagai tempat pembuangan utama untuk pesawat Sekutu yang berlebih, dan selama bertahun-tahun pesawat B-17, P-47, B-25, P-38, A-20G, dan bahkan beberapa P-40 dapat ditemukan dalam berbagai kondisi rusak di daerah tersebut. Beberapa di antaranya diperbarui dan dilantik ke dalam museum di seluruh dunia.

A. Gambaran Umum dari Kawasan RI PNG

Kawasan perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua Nugini membentang sepanjang sekitar 820 kilometer di Pulau Papua, memisahkan Provinsi Papua dan Papua Selatan di Indonesia dengan wilayah Papua Nugini. Wilayah ini didominasi oleh hutan hujan tropis yang lebat, pegunungan terjal, dan lembah-lembah terpencil. Kondisi geografis ini menjadikan wilayah perbatasan tersebut sebagai salah satu kawasan paling sulit dijangkau dan paling kompleks di Asia-Pasifik, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, pengawasan perbatasan, maupun pelayanan publik. Minimnya infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan akses komunikasi menyebabkan mobilitas penduduk terbatas dan kegiatan ekonomi kurang berkembang. Banyak wilayah di perbatasan hanya bisa diakses melalui jalur udara atau sungai, yang tentu saja memerlukan biaya tinggi dan tidak efisien. Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga menyulitkan upaya pengawasan perbatasan secara optimal, sehingga rawan terjadi aktivitas lintas batas ilegal, seperti penyelundupan barang, perdagangan manusia, dan pergerakan kelompok bersenjata.

Dari sisi sosial, masyarakat di kawasan perbatasan memiliki keterikatan budaya dan kekerabatan yang kuat lintas batas negara. Banyak komunitas etnis yang tinggal di kedua sisi perbatasan memiliki bahasa dan adat istiadat yang serupa, sehingga interaksi sosial dan ekonomi antar komunitas ini terus berlangsung meski terpisah secara administratif oleh batas negara. Namun, karena kurangnya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, masyarakat perbatasan cenderung mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Strategisnya kawasan ini tidak dapat diabaikan. Selain sebagai garda terdepan kedaulatan negara, perbatasan Indonesia–Papua Nugini juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan kawasan perbatasan bisa diarahkan pada pendekatan kawasan terpadu berbasis potensi lokal, seperti pertanian, kehutanan berkelanjutan, serta pariwisata berbasis alam dan budaya. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perbatasan dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang representatif dapat menjadi motor penggerak integrasi wilayah perbatasan dengan pusat-pusat pertumbuhan nasional.

Masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini memiliki kedekatan etnis dan budaya yang kuat. Banyak komunitas adat tinggal di kedua sisi perbatasan dengan hubungan kekerabatan, bahasa, serta adat istiadat yang serupa. Hal ini menciptakan interaksi sosial yang intens, termasuk dalam kegiatan sehari-hari seperti pertukaran hasil pertanian, upacara adat, hingga kunjungan antar keluarga yang telah berlangsung secara turun-temurun. Meski interaksi tradisional ini masih berlangsung, keberadaan batas negara menimbulkan tantangan tersendiri. Aturan resmi dari masing-masing negara kerap membatasi mobilitas masyarakat adat, yang secara budaya tidak mengenal batas teritorial modern. Situasi ini menjadi semakin kompleks dengan kehadiran isu-isu seperti migrasi ilegal, pelintas batas tanpa dokumen, dan keberadaan kelompok separatis di wilayah Papua yang kerap memanfaatkan akses perbatasan. Kondisi tersebut menjadikan kawasan ini sebagai wilayah strategis yang memerlukan pendekatan khusus, baik dari sisi keamanan maupun sosial budaya. Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan antara penegakan kedaulatan negara dengan penghormatan terhadap kehidupan budaya masyarakat lokal. Di sisi lain, kerja sama bilateral dengan Papua Nugini juga penting agar pengelolaan perbatasan dapat dilakukan secara harmonis dan manusiawi.

Dari sisi ekonomi, kawasan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini (RI-PNG) masih tergolong tertinggal dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Kehidupan masyarakat di wilayah ini pada umumnya masih bergantung pada kegiatan ekonomi subsisten, seperti pertanian tradisional, berburu, dan meramu hasil hutan. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan turut memperparah kesenjangan pembangunan di kawasan perbatasan ini. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya perbatasan sebagai beranda depan negara dan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mendorong kemajuan wilayah ini. Melalui program-program seperti pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dan peran aktif Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan fisik dan sosial di daerah perbatasan. Salah satu langkah nyata adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang modern dan representatif, seperti yang telah dilakukan di Skouw, Papua. PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang lintas batas, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan aktivitas perdagangan antarnegara. Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam menciptakan kawasan perbatasan yang aman, sejahtera, dan terintegrasi masih cukup kompleks. Masalah keamanan, penyelundupan, ketimpangan sosial, serta minimnya koordinasi lintas batas masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama bilateral yang lebih intensif dan berkelanjutan antara Indonesia dan Papua Nugini, baik di bidang keamanan, ekonomi, maupun sosial budaya. Pendekatan kolaboratif yang mengedepankan pembangunan inklusif, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pelibatan aktif pemangku kepentingan di kedua negara menjadi kunci untuk mewujudkan perbatasan yang benar-benar berfungsi sebagai jembatan, bukan sekat

B. Kepentingan AS di Kawasan Indonesia-Papua Nugini (RI-PNG)

Kepentingan Amerika Serikat (AS) di kawasan Indonesia-Papua Nugini (RI-PNG) sangat erat kaitannya dengan strategi geopolitik dan keamanan nasionalnya di Indo-Pasifik. Kawasan ini merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, di mana ribuan kapal dagang dan militer melintasi setiap tahunnya. Dengan meningkatnya persaingan global, terutama dengan Tiongkok yang terus memperluas pengaruhnya di Asia Pasifik, AS berkepentingan untuk menjaga stabilitas dan kebebasan navigasi di wilayah ini. Kehadiran di RI-PNG memungkinkan AS memperkuat pengaruhnya di kawasan dan mengimbangi kekuatan Tiongkok. Pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, merupakan manifestasi nyata dari kebijakan strategis Washington dalam memperkuat kehadiran militernya di kawasan Pasifik Selatan. Langkah ini tidak hanya menjadi bagian dari upaya mempertahankan supremasi militer AS, tetapi juga mencerminkan respons terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik di Indo-Pasifik, khususnya sebagai akibat dari ekspansi pengaruh Tiongkok yang semakin agresif melalui kebijakan “Belt and Road Initiative” dan pembangunan infrastruktur pelabuhan di negara-negara kepulauan Pasifik. Pangkalan di Port Moresby dirancang untuk meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas militer AS dalam menghadapi potensi konflik atau krisis kemanusiaan di kawasan, dengan memperpendek jarak respons terhadap titik-titik strategis di Asia Tenggara dan Pasifik. Kehadiran pangkalan ini juga berfungsi sebagai pendorong utama dalam membangun kemitraan pertahanan yang lebih erat antara AS dan negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia sebagai mitra strategis dalam keamanan maritim. Melalui latihan militer bersama, program peningkatan kapasitas angkatan bersenjata, serta kerja sama intelijen

dan pengawasan laut, AS berharap dapat memperkuat interoperabilitas militer dan memperkuat aliansi informal yang terbentuk di bawah kerangka Indo-Pacific Command (INDOPACOM). Kemitraan ini penting dalam menghadapi ancaman bersama seperti pembajakan, perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, serta infiltrasi kelompok ekstremis lintas negara yang masih menjadi tantangan di wilayah perbatasan RI-PNG. Secara geografis, posisi Port Moresby memberikan keunggulan strategis yang signifikan. Terletak dekat dengan Laut Arafura dan Selat Torres, kawasan ini merupakan jalur pelayaran utama yang menghubungkan Australia, Indonesia, dan negara-negara Pasifik lainnya. Pengawasan terhadap jalur ini sangat penting untuk menjamin kebebasan navigasi dan mencegah potensi penyusupan kapal militer atau aktivitas ilegal yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Selain itu, pangkalan ini juga berfungsi sebagai pusat logistik dan dukungan operasional bagi pasukan AS, yang dapat digunakan untuk mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat seperti bencana alam, konflik regional, atau krisis pengungsi. Dengan demikian, pembangunan pangkalan ini bukan hanya berorientasi pada kekuatan militer semata, tetapi juga memperkuat peran AS sebagai penyedia keamanan dan stabilitas di Indo-Pasifik.

Kepentingan nasional Amerika Serikat dalam konteks pembangunan pangkalan militer di Papua Nugini tidak hanya terbatas pada dimensi militer, tetapi mencakup pendekatan yang lebih luas dan komprehensif terhadap stabilitas kawasan. Stabilitas politik di Pasifik Selatan sangat penting bagi AS, karena wilayah ini sering kali rentan terhadap pengaruh kekuatan besar seperti Tiongkok melalui diplomasi ekonomi, utang, atau bantuan pembangunan. Dengan memperkuat kehadirannya, AS berupaya menyeimbangkan kekuatan dan memastikan bahwa negara-negara di kawasan tetap berada dalam orbit pengaruh demokrasi liberal dan nilai-nilai yang dijunjung oleh AS. Kehadiran militer ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan negara mitra dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim, bencana alam, dan konflik internal. Dari sisi diplomatik, pembangunan pangkalan militer di Port Moresby menunjukkan bahwa AS serius dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Pasifik, termasuk Indonesia sebagai negara besar di kawasan. Dengan memperkuat hubungan bilateral dan multilateral melalui mekanisme keamanan regional, AS dapat meningkatkan kepercayaan negara-negara mitra terhadap komitmennya dalam menjaga perdamaian dan ketertiban internasional. Ini menjadi bagian dari upaya Amerika dalam memperluas jaringan aliansi dan memperkuat struktur keamanan kolektif yang dapat merespons secara efektif terhadap dinamika ancaman di Indo-Pasifik. Selain itu, akses ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam strategi ini. Kawasan RI-PNG merupakan pintu gerbang ke sumber daya alam yang melimpah, seperti energi, mineral, dan hasil laut yang bernilai tinggi. Dengan menempatkan kekuatan militer di wilayah yang dekat dengan jalur perdagangan utama, AS berupaya memastikan kelancaran arus logistik dan perdagangan yang mendukung perekonomian global, termasuk kepentingan perusahaannya. Keterlibatan yang lebih aktif juga memberi peluang bagi AS untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur, kerja sama teknologi, serta investasi yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi negara-negara mitra, sekaligus mengurangi ketergantungan mereka pada Tiongkok.

C. Kepentingan Pelaksanaan Pembangunan Pangkalan Serta Kaitan Dengan Dinamika Geopolitik di Kawasan Indo-Pasifik

Pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Port Marbey, Papua Nugini, merupakan bagian integral dari strategi geopolitik jangka panjang Washington dalam

memperkuat kehadiran serta pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini kini menjadi pusat perhatian global karena posisinya yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta perannya sebagai jalur perdagangan internasional yang krusial. Dalam konteks ini, kehadiran militer AS di Papua Nugini bukan sekadar penempatan kekuatan militer, melainkan upaya sistematis untuk menegaskan komitmen Amerika Serikat terhadap arsitektur keamanan kawasan dan menjaga tatanan internasional berbasis aturan (*rules-based order*) yang selama ini menjadi landasan kebijakan luar negeri AS. Langkah ini juga mencerminkan berbagai bentuk kepentingan nasional AS yang saling terkait, di antaranya adalah menjaga stabilitas kawasan dari potensi konflik, memastikan keamanan jalur pelayaran global terutama di sekitar Laut China Selatan dan Samudra Pasifik serta membendung pengaruh Tiongkok yang semakin ekspansif secara militer, ekonomi, dan diplomatik.

Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh Papua Nugini sebagai tuan rumah pangkalan, tetapi juga menjalar ke negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan memiliki posisi strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas kawasan. Peningkatan kehadiran militer asing di wilayah yang berdekatan dengan perbatasannya menimbulkan kebutuhan bagi Indonesia untuk menilai kembali strategi keamanan nasional, arah kebijakan luar negeri, serta peran aktifnya dalam menjaga keseimbangan regional agar tidak terjebak dalam rivalitas antara kekuatan besar.

Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dan salah satu pemangku kepentingan utama dalam arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam merespons setiap perubahan geopolitik di sekelilingnya. Letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan jalur perdagangan global dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini menjadikannya sangat rentan terhadap dinamika keamanan regional, termasuk pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Port Moresby. Keberadaan pangkalan militer asing yang dekat dengan wilayah perbatasan Indonesia bukan hanya menyangkut isu pertahanan, tetapi juga menyentuh aspek kedaulatan, stabilitas, dan kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini menekankan prinsip bebas aktif.

Dalam hal ini, pembangunan pangkalan militer tersebut memunculkan pertanyaan strategis mengenai keseimbangan kekuatan di kawasan, serta bagaimana negara-negara besar memproyeksikan pengaruh dan kepentingannya di sekitar Indonesia. Meskipun Amerika Serikat mengklaim kehadirannya bertujuan menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, Indonesia tetap harus mencermati potensi implikasi jangka panjang dari dinamika rivalitas kekuatan besar seperti AS dan Tiongkok. Keterlibatan militer asing yang semakin intensif berpotensi menciptakan ketegangan baru atau bahkan eskalasi konflik jika tidak dikelola dengan prinsip dialog dan kerja sama multilateral.

Oleh karena itu, menjadi penting bagi Indonesia untuk memahami secara mendalam bentuk-bentuk kepentingan nasional Amerika Serikat yang mendasari pembangunan pangkalan di Port Moresby. Dengan pemahaman tersebut, Indonesia dapat merumuskan posisi yang seimbang: tetap menjaga hubungan baik dengan semua mitra strategis, tanpa kehilangan kendali atas kepentingan nasionalnya sendiri. Di tengah dinamika Indo-Pasifik yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran sebagai penengah dan promotor stabilitas regional, sembari memastikan bahwa kepentingan domestiknya tetap menjadi prioritas utama.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yakni Satgas Pamtas RI - PNG (Swasembada), Letda Panji Prabowo, Lettu Abdul Faisal, Lettu Reza

Yanuar Seherman, S. T. Han. Yang dapat disimpulkan bahwa Pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Port Marbey, Papua Nugini, tidak bisa dilepaskan dari kepentingan nasional AS yang lebih luas di kawasan Indo-Pasifik. Secara terbuka, Amerika Serikat menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan, memastikan kebebasan navigasi, serta melindungi jalur perdagangan strategis yang menjadi nadi ekonomi global. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan personel Satgas Pamtas RI–PNG (Swasembada), terungkap bahwa kepentingan AS jauh lebih kompleks dan mencerminkan strategi jangka panjang yang tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga ofensif dalam hal proyeksi kekuatan dan pengaruh.

Letda Panji Prabowo, dari Satgas Pamtas RI–PNG, menyoroti bahwa Amerika Serikat memanfaatkan dinamika geopolitik di Indo-Pasifik khususnya meningkatnya pengaruh Tiongkok sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisinya di Papua Nugini dan negara-negara Pasifik lainnya. Menurutnya, strategi ini dilakukan dengan pendekatan “counterbalance tanpa konfrontasi langsung,” yakni upaya mengimbangi kekuatan Tiongkok secara terstruktur melalui saluran diplomatik, militer, dan ekonomi secara bersamaan. Pangkalan militer di Port Marbey menjadi salah satu instrumen penting dalam kerangka tersebut, memperkuat kehadiran AS tanpa harus terlibat dalam konflik terbuka.

Lebih jauh, Lettu Abdul Faisal menambahkan bahwa pembangunan pangkalan ini sangat mungkin menyimpan agenda tersembunyi. Salah satunya adalah untuk memperluas jangkauan logistik dan operasi militer AS di Pasifik Barat, sekaligus membuka akses strategis ke pelabuhan dan bandara utama di wilayah tersebut. Hal ini berpotensi digunakan untuk “mengepung” pengaruh Tiongkok secara geografis, sekaligus memastikan AS memiliki pijakan permanen dalam setiap kontingensi militer yang mungkin terjadi. Sementara itu, Lettu Reza Yanuar Suherman menyoroti dimensi intelijen dan pengaruh politik dari pangkalan ini. Ia menyatakan bahwa selain fungsi militer, keberadaan pangkalan juga dapat digunakan untuk pengumpulan data intelijen regional serta mengontrol akses terhadap sumber daya strategis secara terselubung, yang menjadi bagian dari upaya dominasi regional AS tanpa menunjukkan agresi secara langsung.

Dalam konteks Indonesia, kehadiran pangkalan militer AS di wilayah yang sangat dekat dengan perbatasan timur Nusantara menimbulkan tantangan dan kekhawatiran tersendiri. Indonesia, yang selama ini mengedepankan politik luar negeri bebas aktif, perlu waspada terhadap kemungkinan perubahan keseimbangan kekuatan di kawasan. Implikasi strategis dari kehadiran militer AS ini bisa menciptakan tekanan baru terhadap kedaulatan nasional, serta mendorong Indonesia untuk memperkuat posisi diplomatik dan pertahanannya agar tidak terseret dalam rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap kepentingan tersembunyi maupun terbuka dari pembangunan pangkalan militer ini menjadi kunci bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan dan merumuskan kebijakan luar negeri yang adaptif.

Pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Port Marbey, Papua Nugini, merupakan langkah strategis yang mencerminkan kepentingan nasional jangka panjang AS dalam mempertahankan dominasi dan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini dalam dua dekade terakhir telah berubah menjadi pusat gravitasi geopolitik dunia, ditandai dengan rivalitas yang semakin tajam antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua kekuatan besar ini saling berlomba memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan militer demi mengamankan kepentingan nasional masing-masing. Dalam konteks ini, Papua Nugini menjadi sangat relevan karena letaknya yang strategis di antara Samudra Pasifik dan Asia

Tenggara, menjadikannya titik penting dalam rantai logistik militer dan perdagangan regional. Secara resmi, pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa pembangunan pangkalan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas kawasan, menjamin kebebasan navigasi di jalur pelayaran internasional, serta melindungi jalur perdagangan laut yang vital bagi perekonomian global. Namun, narasi yang dibangun tersebut, meskipun sah secara diplomatik, tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas kepentingan tersembunyi yang mungkin menjadi bagian dari agenda strategis jangka panjang AS.

Pandangan ini diperkuat oleh temuan dan wawancara lapangan yang dilakukan dengan personel Satgas Pantas RI–PNG (Swasembada), yang bertugas di wilayah perbatasan dan memiliki pemahaman langsung terhadap dinamika keamanan di sekitar Papua Nugini. Letda Panji Prabowo menyoroti bahwa AS memanfaatkan peningkatan pengaruh Tiongkok di Pasifik sebagai momentum untuk memperkuat pijakan geopolitiknya secara sistematis. Ia menilai strategi yang digunakan AS adalah bentuk dari “counterbalance tanpa konfrontasi langsung,” yang mengedepankan pendekatan terpadu melalui jalur diplomatik, ekonomi, dan militer secara simultan. Dalam strategi ini, pembangunan pangkalan militer bukan sekadar penempatan kekuatan fisik, tetapi juga simbol komitmen jangka panjang terhadap stabilitas kawasan dan instrumen proyeksi kekuatan yang halus namun efektif. Papua Nugini dipilih karena posisinya yang belum terlalu terikat pada blok geopolitik tertentu dan cenderung membuka diri terhadap bantuan serta kerja sama internasional. Dengan cara ini, AS dapat membangun pengaruh secara bertahap tanpa harus menimbulkan resistensi terbuka dari negara-negara di kawasan yang mungkin khawatir terhadap eskalasi konflik terbuka.

Lebih lanjut, Lettu Abdul Faisal dan Lettu Reza Yanuar Suherman dari Satgas yang sama mengemukakan bahwa pembangunan pangkalan militer ini kemungkinan besar juga membawa agenda tersembunyi yang lebih kompleks. Abdul Faisal menyatakan bahwa di balik proyek pangkalan tersebut, AS ingin memperluas jangkauan logistik dan operasionalnya secara permanen di Pasifik Barat. Akses terhadap pelabuhan dan bandara utama memungkinkan AS menempatkan pasukan, peralatan tempur, dan sistem pendukung lainnya dalam skema yang dapat diaktifkan sewaktu-waktu jika kondisi geopolitik mengharuskan. Strategi ini sangat mungkin diarahkan untuk mengepung atau mengimbangi pengaruh Tiongkok yang terus memperkuat posisinya di Asia Tenggara, Pasifik Selatan, dan bahkan sampai ke Afrika melalui jalur maritim. Sementara itu, Lettu Reza Yanuar Suherman menambahkan bahwa pangkalan tersebut juga dapat berfungsi sebagai pusat pengumpulan intelijen regional, pengawasan aktivitas ekonomi dan militer negara-negara lain di kawasan, serta sarana pengendalian terhadap akses sumber daya strategis di Pasifik. Semua ini dilakukan dalam balutan kerja sama pertahanan dan bantuan pembangunan, sehingga tidak menimbulkan kesan agresif secara terbuka, tetapi tetap memperkuat posisi geopolitik AS secara signifikan.

Bagi Indonesia, kedekatan geografis dengan Papua Nugini menjadikan pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Port Marbey sebagai isu strategis yang berpotensi berdampak langsung terhadap keamanan nasional dan posisi politik luar negeri Indonesia di kancah internasional. Sebagai negara demokratis yang memegang teguh prinsip bebas aktif, Indonesia secara konsisten menghindari keberpihakan dalam rivalitas blok kekuatan besar, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun, dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan, terutama dengan kehadiran fisik militer asing dalam radius dekat dengan perbatasan nasional, menuntut Indonesia untuk lebih waspada dan responsif terhadap berbagai

kemungkinan ancaman atau perubahan struktur kekuasaan yang dapat mengganggu kedaulatan dan stabilitas kawasan.

Kehadiran pangkalan militer AS ini menimbulkan sejumlah kekhawatiran yang tidak hanya bersifat teknis-militer, tetapi juga strategis dan politis. Secara geografis, wilayah Papua, khususnya Papua Selatan, yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, berisiko menjadi zona yang semakin sensitif secara militer. Ketika pangkalan tersebut digunakan untuk kepentingan intelijen atau proyeksi kekuatan militer terhadap kekuatan lain di kawasan, Indonesia berada dalam posisi yang rentan menjadi pihak terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik baru, memicu perlombaan senjata, atau bahkan menciptakan tekanan terhadap posisi netral Indonesia di antara kekuatan besar. Selain itu, jika pangkalan digunakan sebagai titik logistik militer untuk operasi regional, maka pergerakan pasukan dan alat utama sistem senjata (alutsista) di sekitar wilayah Indonesia bisa memicu kecemasan dalam negeri maupun reaksi dari negara-negara lain yang menjalin hubungan strategis dengan Indonesia.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko tersebut, Indonesia perlu memperkuat kapasitas pertahanan nasional, terutama di wilayah timur yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, melalui modernisasi alutsista, peningkatan kesiapsiagaan TNI, serta pemberdayaan sistem keamanan perbatasan. Selain itu, diplomasi aktif harus menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas kawasan. Indonesia memiliki posisi unik dan berpengaruh dalam organisasi regional seperti ASEAN dan forum Indo-Pacific lainnya, yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong dialog strategis, kerja sama pertahanan kolektif yang inklusif, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Di tengah persaingan kekuatan besar yang semakin intensif, Indonesia tidak hanya harus menjadi pengamat, tetapi juga aktor utama yang mendorong tatanan kawasan yang adil, aman, dan berbasis pada penghormatan terhadap kedaulatan negara.

B. Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Kawasan RI-PNG melalui Pembangunan Pangkalan militer di Port Moreby.

Kepentingan nasional Amerika Serikat (AS) di kawasan perbatasan Republik Indonesia–Papua Nugini (RI–PNG) sangat strategis karena letaknya pada jalur pelayaran dan komunikasi internasional. Melalui pembangunan pangkalan militer di Port Moresby, AS berupaya memperkuat proyeksi kekuatan di Indo-Pasifik, mengawasi aktivitas negara lain seperti China, sekaligus menjaga stabilitas regional. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat logistik, patroli maritim, pengawasan udara, serta basis operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Namun, kehadiran militer AS juga menimbulkan dinamika diplomatik yang kompleks, terutama terkait sensitivitas politik dan kekhawatiran negara-negara tetangga, termasuk Indonesia dan Australia. Situasi ini berpotensi memicu eskalasi geopolitik di kawasan. Karena itu, AS perlu menyeimbangkan kepentingan militernya dengan pendekatan diplomatik yang inklusif, transparan, serta kerja sama regional di bidang keamanan dan kemanusiaan. Evaluasi berkelanjutan terhadap dampak politik, ekonomi, dan sosial budaya menjadi penting agar strategi AS tidak memicu ketegangan, melainkan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Indo-Pasifik.

1. Kepentingan pertahanan

Kepentingan pertahanan menjadi prioritas utama bagi negara untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas wilayah dari ancaman internal maupun eksternal. Dalam

konteks kawasan perbatasan Republik Indonesia–Papua Nugini (RI-PNG), Amerika Serikat memandang wilayah ini strategis karena berada di jalur pelayaran internasional dan menjadi arena persaingan geopolitik Indo-Pasifik. Sebagai respons, AS membangun pangkalan militer di Port Moresby guna memperkuat kesiapsiagaan, patroli, serta pengawasan keamanan maritim dan regional. Pangkalan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat operasi militer, tetapi juga menjadi sarana kerja sama pertahanan dengan negara-negara kawasan, termasuk Australia dan Indonesia, melalui latihan bersama dan pertukaran intelijen. Keberadaan pangkalan ini memberi AS kemampuan permanen dalam menjaga kebebasan navigasi, keamanan jalur perdagangan global, serta keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik.

2. Kepentingan ekonomi

Kepentingan ekonomi menjadi faktor utama dalam strategi Amerika Serikat di kawasan perbatasan Republik Indonesia–Papua Nugini (RI-PNG). Selain aspek pertahanan, wilayah ini memiliki nilai strategis karena jalur pelayaran internasional serta sumber daya alam yang melimpah. Pembangunan pangkalan militer di Port Moresby memberikan AS keunggulan dalam mengamankan jalur perdagangan global, meminimalisasi ancaman seperti pembajakan, penyelundupan, dan konflik maritim, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Pangkalan ini juga berfungsi sebagai pusat kerja sama dengan negara-negara kawasan, khususnya Indonesia dan Australia, dalam perlindungan infrastruktur kritis serta pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan pangkalan tidak hanya memperkuat kepentingan ekonomi dan keamanan AS, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi regional, stabilitas Indo-Pasifik, serta integrasi ekonomi global yang lebih berkelanjutan.

3. Kepentingan tatanan dunia

Kepentingan menjaga tatanan dunia menjadi salah satu pilar utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang berfokus pada stabilitas politik, keamanan, dan kerja sama internasional. Dalam konteks Indo-Pasifik, pembangunan pangkalan militer di Port Moresby, Papua Nugini, merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi AS dalam mencegah eskalasi konflik, menjaga keseimbangan kekuatan, serta memastikan aturan dan norma internasional dihormati. Kehadiran pangkalan ini tidak hanya memperkuat kapabilitas militer, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi dan kerja sama multilateral dengan negara-negara kawasan, seperti Indonesia, Papua Nugini, dan Australia. Pangkalan tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi bagi dialog konstruktif, kolaborasi keamanan, serta penguatan aliansi regional yang mendukung perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pangkalan di Port Moresby merepresentasikan komitmen AS dalam memelihara tatanan dunia yang inklusif, berbasis hukum internasional, dan mengedepankan kesejahteraan bersama di tengah dinamika geopolitik global.

4. Kepentingan ideologis

menjadi pilar utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang berlandaskan pada nilai demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Dalam konteks Indo-Pasifik, pembangunan pangkalan militer di Port Moresby, Papua Nugini, tidak hanya ditujukan untuk kepentingan strategis dan pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen penyebaran nilai-nilai ideologis tersebut. Kehadiran pangkalan memungkinkan AS memperkuat diplomasi ideologis melalui kerja sama militer,

pelatihan, bantuan keamanan, dan inisiatif kemanusiaan, sehingga mendorong tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Pangkalan ini sekaligus menjadi simbol komitmen AS dalam mempertahankan tatanan dunia yang berbasis pada hak asasi manusia dan kebebasan politik, serta sebagai sarana memperkuat jaringan negara-negara yang memiliki komitmen serupa. Dengan demikian, pangkalan Port Moresby berfungsi ganda sebagai instrumen pertahanan dan diplomasi ideologis, yang menegaskan peran AS dalam menjaga stabilitas kawasan dan memperluas pengaruh nilai-nilai universal di Indo-Pasifik.

Adapun tujuan utama dari Pembangunan pangkalan militer AS di Serikat di Port Moresby, Papua Nugini, yang mencerminkan kepentingan nasional AS di kawasan perbatasan RI-PNG :

- Menganalisis Bentuk dan Strategi Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Kawasan Perbatasan RI-PNG melalui Pembangunan Pangkalan Militer di Port Moresby.
- Mengkaji Implikasi Pembangunan Pangkalan Militer AS terhadap Hubungan Bilateral Indonesia–Papua Nugini dan Stabilitas Keamanan Regional.
- Memberikan Rekomendasi Kebijakan bagi Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Geopolitik yang Timbul dari Pembangunan Pangkalan Militer AS di Kawasan Perbatasan RI-PNG.

Secara Sarana kepentingan yang dimiliki berupa:

- **Sasaran Akademis.** Menghasilkan kajian ilmiah yang komprehensif dan sistematis mengenai kepentingan nasional Amerika Serikat di kawasan perbatasan RI-PNG, khususnya melalui pembangunan pangkalan militer di Port Moresby, sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hubungan internasional dan studi geopolitik Indo-Pasifik.
- **Sasaran Praktis.** Memberikan pemahaman dan informasi strategis yang berguna bagi pembuat kebijakan, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan terkait di Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika keamanan perbatasan dan persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.
- **Sasaran Kebijakan.** Menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia, terutama dalam hal penguatan pengamanan wilayah perbatasan, diplomasi bilateral dengan Papua Nugini, serta pengelolaan hubungan dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok agar dapat menjaga kedaulatan dan stabilitas regional.

Analisis SWOT terkait *Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Kawasan RI–PNG melalui Pembangunan Pangkalan Militer di Port Moresby*:

1. Strengths (Kekuatan):

- **Kekuatan militer dan teknologi tinggi.** Amerika Serikat memiliki kemampuan logistik, persenjataan, dan sistem pengintaian canggih untuk mendukung keberadaan pangkalan secara berkelanjutan.
- **Jaringan aliansi regional.** AS memiliki hubungan strategis dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik seperti Australia, Jepang, dan Filipina, yang memperkuat posisi pangkalan secara geopolitik.

- **Kemampuan proyeksi kekuatan global.** Pangkalan ini memperluas jangkauan operasional militer AS, memungkinkan respons cepat terhadap krisis di Asia Tenggara dan Pasifik.

2. Weaknesses (Kelemahan):

- **Ketergantungan pada kerja sama negara tuan rumah.** Stabilitas pangkalan sangat tergantung pada sikap politik Papua Nugini yang bisa berubah seiring dinamika domestik dan tekanan regional.
- **Jarak geografis dari pusat komando utama.** Lokasi Port Moresby cukup jauh dari pangkalan utama AS, sehingga memerlukan dukungan logistik dan koordinasi yang kompleks.
- **Kesan imperialisme.** Kehadiran militer AS dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat lokal dan negara tetangga, termasuk Indonesia, yang menjunjung prinsip bebas aktif.

3. Opportunities (Peluang):

- **Penguatan pengaruh AS di Pasifik Selatan.** Pangkalan ini memberikan peluang strategis bagi AS untuk meningkatkan keterlibatan di wilayah yang sebelumnya didominasi pengaruh Tiongkok.
- **Pemantauan jalur perdagangan dan sumber daya alam.** Pangkalan ini dapat digunakan untuk mengamankan rute perdagangan vital serta mengawasi eksploitasi sumber daya di Pasifik.
- **Peluang diplomatik dan pertahanan Bersama.** AS bisa memperluas kerja sama militer dan intelijen dengan Papua Nugini dan negara-negara tetangga melalui kehadiran permanen di kawasan.

4. Threats (Ancaman).

- **Ketegangan dengan negara-negara regional.** Kehadiran militer AS dapat memicu reaksi dari Indonesia atau negara-negara ASEAN yang khawatir terhadap militerisasi kawasan.
- **Konflik terbuka dengan Tiongkok.** Pangkalan ini berpotensi menjadi titik gesekan langsung dalam rivalitas strategis AS–Tiongkok, yang dapat meningkatkan ketidakstabilan regional.
- **Ancaman terhadap kedaulatan nasional Papua Nugini.** Protes domestik dan tekanan politik internal dapat mempersulit keberlanjutan operasional pangkalan.

Strategi yang dapat disusun berdasarkan hasil analisis SWOT mengenai *Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Kawasan RI–PNG melalui Pembangunan Pangkalan Militer di Port Moresby*:

- Strategi SO (Strengths–Opportunities). (Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang).
- Strategi WO (Weaknesses–Opportunities). (Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang).
- Strategi ST (Strengths–Threats). (Menggunakan kekuatan untuk mengatasi

ancaman).

- Strategi WT (Weaknesses–Threats). (Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman).

KESIMPULAN

Kepentingan nasional Amerika Serikat di kawasan RI–PNG melalui pembangunan pangkalan militer di Port Moresby menunjukkan bahwa langkah tersebut tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan bilateral dengan Papua Nugini, melainkan bagian dari strategi besar AS dalam merespons dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif. Berdasarkan pembahasan terkait rumusan masalah pertama (1.2.1), pembangunan pangkalan ini mencerminkan bentuk-bentuk kepentingan nasional AS yang bersifat multidimensional, mencakup kepentingan militer (proyeksi kekuatan dan kesiapsiagaan operasional), kepentingan ekonomi (pengamanan jalur perdagangan laut internasional), serta kepentingan politik (membendung pengaruh Tiongkok di Pasifik Barat). Amerika Serikat memanfaatkan keberadaan strategis Papua Nugini untuk membangun titik pengaruh baru yang memungkinkan kontrol tidak langsung terhadap kawasan yang selama ini kurang terakses oleh kekuatan besar Barat, namun menjadi titik tarik baru dalam kontestasi geopolitik global.

Lebih lanjut, pembangunan pangkalan militer di Port Moresby berdampak langsung terhadap hubungan Indonesia–Papua Nugini serta stabilitas kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, sebagaimana dijelaskan dalam rumusan masalah kedua (1.2.2). Sebagai negara yang berbatasan darat langsung dengan Papua Nugini, Indonesia berada dalam posisi yang sangat sensitif terhadap kehadiran kekuatan militer asing di dekat wilayah perbatasannya. Hal ini dapat menimbulkan kecemasan atas potensi pelanggaran kedaulatan, penyusupan pengaruh asing, dan kemungkinan penggunaan pangkalan tersebut sebagai basis operasi yang berorientasi pada kepentingan sepihak. Di sisi lain, pembangunan pangkalan ini juga membuka kemungkinan kerja sama keamanan perbatasan yang lebih erat jika dikelola melalui pendekatan transparansi dan diplomasi terbuka. Namun demikian, stabilitas kawasan tetap bergantung pada bagaimana negara-negara seperti Indonesia dan PNG menyikapi kehadiran AS secara hati-hati, serta bagaimana AS mampu menunjukkan bahwa keberadaannya bukan bentuk intervensi, melainkan bagian dari sistem kolektif keamanan kawasan.

Dengan demikian, pembangunan pangkalan militer AS di Port Moresby mencerminkan gejala nyata perubahan arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks dan kompetitif. Indonesia, sebagai aktor strategis di Asia Tenggara, perlu mengembangkan strategi penyeimbang (*balancing strategy*) yang tidak hanya mengutamakan keamanan perbatasan dan pertahanan nasional, tetapi juga mendorong diplomasi kawasan yang berorientasi pada stabilitas jangka panjang. Pendekatan Indonesia harus tetap berdasarkan prinsip bebas aktif, namun disertai kemampuan antisipatif terhadap dinamika kekuatan besar yang kini semakin mendekati wilayah kedaulatannya. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri Indonesia harus adaptif, proaktif, dan berbasis kepentingan nasional yang tidak mudah terkooptasi oleh agenda strategis negara adidaya mana pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito, Johan Setiawan. Metodologi penelitian kualitatif. CVJejak. 2018.
- Andersen, Morten Skumsrud. *Balance of Power. The Encyclopedia of Diplomacy*, 2018.
- Baldwin, David Alle. *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. Columbia University Press. 1993.
- Kaplan, Robert D. (2014). *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific*. Random House.
- M. Afdhal Chatra P, Komang Ayu Henny Achjar, Ningsi, Muhamad Rusliyadi, A. Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, Ayuliamita Abadi. METODE PENELITIAN KUALITATIF : Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus.
- Mearsheimer, John J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. W. W. Norton & Company
- Snyder, Glenn H. (1988). Alliance Theory: A Neorealist First Cut. *World Politics*, 41(1), 103-132.
- Storey, Ian. (2016). China's Maritime Silk Road Initiative. *ISEAS Perspective*, 31, 1-8
- S.L , Roy. "Diplomasi". Jakarta Utara, PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Watson, Adam. *The Dialogues Between States*. London, Methuem, 1984.
- Walt, Stephen M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. *International Security*, 9(4), 3-43
- <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/B21A/2017/B.231.17.0154/B.231.17.0154-05-BAB-II-20210227095920.pdf>
- https://plato-stanford-edu.translate.google.com/entries/realism-intl-relations/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- https://www.gramedia.com/literasi/teori-bruner/?srsltid=AfmBOorsB5Jumqv3f0n-R5Kk5eJ0y3Z_FmlPpkFwq5vhdrALoRjRr68H